

# KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 9 April 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

## **KATA PENGANTAR**

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Selasa, 9 April 2019	Tarif Atas dan Bawah Segera Dibuat	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dihadiri sejumlah kementerian terkait diputuskan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan perhitungan acuan tarif batas atas dan tarif bawah harga air baku perwilayah.
2	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Selasa, 9 April 2019	Berita Foto	Progres Tol Serang - Panimbang
3	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Selasa, 9 April 2019	Waskita Menanti Dana Talangan Kembali	PT Waskita Toll Road masih menunggu pengembalian dana talangan proyek pembebasan lahan jalan tol miliknya dari lembaga Manajemen Aset Negara.
4	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Selasa, 9 April 2019	Proyek Ladongi Rampung Tahun ini	Kementerian PUPR memacu pembangunan Bendungan Ladongo yang sudah dikerjakan sejak 2016. Proyek Sumber daya air yang berada di Sulawesi Tenggara ini akan dirampungkan pada tahun ini.
5	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)	Selasa, 9 April 2019	Gubernur DKI Terbitkan Pergub	Dalam Pergub tersebut, yang dimaksud dengan naturalisasi adalah pengelolaan prasarana SDA melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dengan tetap memperhatikan kapasitas tampung, fungsi pengendalian banjir, serta konservasi.
6	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)	Selasa, 9 April 2019	Bali Dapat Jatah 14 Proyek	Bali direncanakan mendapat 14 proyek infrastruktur untuk periode 2020-2024, di antaranya jalan tol Gilimanuk – Denpasar , pembangunan jaringan air minum, dan pengelolaan sampah.
7	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Selasa, 9 April 2019	Madura Bisa Jadi KEK Garam	Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak saat membuka Forum Group Discussion KEK Garam di Universitas Trunojoyo Madura mengatakan, Madura memiliki potensi besar dalam produksi garam mengingat selama ini Madura berkontribusi 60% dari total produksi garam nasional
8	Koran Tempo (Halaman, 25)	Selasa, 9 April 2019	Pemerintah Perbanyak Model Investasi Infrastruktur Swasta	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, mengatakan akan menambah skema investasi untuk swasta agar berperan lebih besar dalam pembangunan infrastruktur

Judul	Tarif Atas dan Bawah Segera Dibuat	Tanggal	Selasa, 9 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dihadiri sejumlah kementerian terkait diputuskan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan perhitungan acuan taris batas atas dan tariff bawah harga air baku perwilayah.		

# Tarif Atas dan Bawah Segera Dibuat

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan aturan melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai payung penetapan tarif atas dan tarif bawah harga air minum pada perusahaan daerah air minum.

Anggara Purnando  
anggara.purnando@bisnisid.com

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dihadiri sejumlah kementerian terkait diputuskan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan perhitungan acuan tarif batas atas dan tarif bawah harga air baku per wilayah.

Penetapan harga acuan ini akan mendorong pertumbuhan bisnis perusahaan daerah air minum (PDAM).

"Tadi diperintahkan kepada Kemendagri untuk menghitung berapa tarif bawah dan tarif atas per wilayah sehingga menjadi pegangan dan harga tidak imajinasi. Tiap daerah beda-beda. Kemendagri sudah ada kajian itu. Sudah ada aturan [soal bisnis PDAM], tetapi belum ada tarif bawah dan atasnya sehingga nantinya setiap ada program [penyediaan air bersih] bisa dihitung dari situ," kata Basuki di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (8/4).

Selain menetapkan batas atas dan batas bawah harga jual air bersih, Basuki menyebutkan bahwa pemerintah juga akan memberi dorongan agar pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal bagi PDAM di wilayahnya masing-masing.

Basuki menjelaskan bahwa pemberian akses air bersih bagi masyarakat merupakan bentuk investasi pemerintah. Saat ini, di sejumlah wilayah, akses air

► Pemerintah juga akan memberi dorongan agar pemda dapat melakukan penyertaan modal bagi PDAM di wilayah masing-masing.

► Pembangunan akses air bersih sebanyak 10 juta sambungan membutuhkan investasi di atas Rp100 triliun.

bersih harus dibes dengan harga sangat mahal.

"Etdi menjadi dasar pemikiran air PDAM. 1 meter kubik itu sekitar Rp5.000. Kalau yang di Warakas, Jakarta Utara, misalnya, pakai gerobak itu Rp6.000 per kubik, atau air minum dalam kemasan, itu bisa Rp6 juta per meter kubik. Ini yang jadi pemikiran kita berapa konsumsi masyarakat yang habis di situ," katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menuturkan bahwa pemda juga didorong untuk memberi modal tambahan kepada PDAM.

Modal kerja tambahan ini terutama untuk wilayah tempat perusahaan air minum menetapkan tarif jauh di bawah keekonomiaannya sehingga dapat melakukan investasi baru.

Menurutnya, anggaran daerah untuk air hanya 0,30% dari APBD. Selain itu, dana alokasi khusus yang diajukan daerah mengenai air juga sangat kecil.



## Peran Swasta Sangat Diharapkan

Pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat memerlukan kerja sama badan usaha karena terbatasnya anggaran pemerintah. Untuk memenuhi target akses air minum 100% selama 5 tahun (2015–2019), dibutuhkan investasi Rp254 triliun.

### Proyek SPAM yang Ditawarkan kepada Badan Usaha

Nama Proyek	Kapasitas (liter per detik)	Status*	Mekanisme Kerja Sama
SPAM Umbulan	4.000	Konstruksi	KPBU
SPAM Bandar Lampung	750	Konstruksi	KPBU
SPAM Semarang Barat	750	Transaksi	KPBU
SPAM Regional Jatiluhur	5.000	Transaksi	KPBU
SPAM Ciawi	150	Persiapan proyek	Business to business
SPAM Kota Pekanbaru	500	Persiapan proyek	KPBU
SPAM Kota Dumai	450	Persiapan proyek	KPBU
SPAM Karian	4.600	Persiapan proyek	KPBU

Sumber: BPPSPAM, Ref. \*) Per. Juni 2018, BSN/BAKTYO/04

"Ini artinya kebanyakan daerah belum mempunyai akses air bersih yang layak dan itu karena air bakunya tidak tersedia atau pipanya yang tidak sampai. Jadi, kita ini berbicara bukan daerah per daerah ini semua daerah di Indonesia," katanya.

Bambang menyebutkan bahwa upaya peningkatan kelayakan pada bisnis air bersih ini sangat mendesak dilakukan karena masih tingginya tingkat kebocoran

air baku di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki, tercatat 33% air terbuang percuma akibat beragam permasalahan seperti pencurian hingga pipa bocor yang tidak tertangani.

"Ini adalah beberapa aspek yang nantinya akan diperbaiki sekaligus kita membangun yang sambungan [10 juta] rumah tangga baru dalam 5 tahun ke depan," katanya.

Pemerintah menargetkan, membuat 10 juta sambungan air

bersih ke rumah tangga Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019–2024.

#### INVESTASI BESAR

Bambang mengatakan bahwa untuk membangun akses air bersih sebanyak 10 juta sambungan itu dibutuhkan investasi di atas Rp100 triliun. Investasi ini mencakup pengelolaan akses di hulu hingga penyaluran ke rumah tangga.

"Rapat yang dipimpin Wakil Presiden [Jusuf Kalla] baru saja membicarakan mengenai fokus pada ketahanan air. Kami melihat bahwa pada tahun lalu akses air bersih atau air minum layak itu baru sekitar 68% dan yang melalui pipa bahkan hanya 20%," ujarnya.

Sementara itu, kalangan pengusaha air minum menilai bahwa rencana pemerintah untuk fokus memasing 10 juta sambungan air bersih baru akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Erlan Hidayat menuturkan bahwa ekspansi senilai Rp100 triliun ini tidak akan berbenturan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai rezim pengelolaan air.

"Aturan yang ada [berlaku saat ini] bekerja sama dengan pihak swasta itu memungkinkan. Yang penting pelaksanaan investasi itu tidak dari hulu sampai hilir," kata Erlan di Istana Wakil Presiden, kemarin.

Dia menyebutkan bahwa fokus pembicaraan dengan pemerintah di kantor Wakil Presiden adalah mencari solusi terbaik.

"Tujuan akhirnya adalah pelayanan masyarakat. Agar air bersih bisa terjangkau dengan harga lebih kompetitif," katanya.

Indonesia hingga kini masih membutuhkan pasokan air bersih dalam jumlah sangat besar. Oleh karena itu, peran swasta juga sangat diperlukan.

Hingga 2017, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) mencatat bahwa ada 29 proyek kerja sama yang terlaksana dalam bentuk *business to business* ataupun kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dengan kapasitas sebesar 36.330 liter per detik.

Saat ini, ada 11 rencana kerja sama pengusahaan air minum dengan swasta dengan total kapasitas produksi 19.100 liter per detik. ■

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Selasa, 9 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Progres Tol Serang - Panimbang		

► **PROGRES TOL SERANG-PANIMBANG**



*Antara/Weli Ayu Rejeki*

**Sejumlah pekerja** menggunakan alat berat menyelesaikan tahap penimbunan dan pemadatan pembangunan proyek jalan tol Serang-Panimbang di Kampung Sukaratu, Cikeusal, Serang, Banten, pekan lalu. Saat ini, pembangunan tol sepanjang 83,70 kilometer

itu telah mencapai 35%, dan ditargetkan pada November 2019 seksi 1 Serang-Rangkasbitung sepanjang 26,50 kilometer dapat dioperasikan.

Judul	Waskita Menanti Dana Talangan Kembali	Tanggal	Selasa, 9 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	PT Waskita Toll Road masih menunggu pengembalian dana talangan proyek pembebasan lahan jalan tol miliknya dari lembaga Manajemen Aset Negara.		

# Waskita Menanti Dana Talangan Kembali

Bisnis, JAKARTA — PT Waskita Toll Road masih menunggu pengembalian dana talangan proyek pembebasan lahan jalan tol miliknya dari Lembaga Manajemen Aset Negara.

Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakto mengatakan bahwa saat ini terdapat sejumlah dana talangan yang masih belum diganti oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

“Ada dua posisi *oustanding*. *Pertama*, posisi *oustanding* di LMAN senilai Rp2,50 triliun DTT [dana talangan tanah], belum dibayarkan karena LMAN masih menganggap ada dokumen yang kurang. *Kedua*, posisi *oustanding* yang belum diverifikasi BPKP senilai Rp3,30 triliun, belum bisa diajukan ke LMAN karena BPKP belum melakukan verifikasi,” ujarnya kepada *Bisnis*, Senin (8/4).

Menurut Herwi, dana talangan yang belum dibayarkan ini dapat mengganggu aliran kas serta pembangunan proyek yang sedang atau akan dibangun.

“Bisa berdampak dengan penyelesaian konstruksi iya, mundur begitu bukan pada tahun ini. Karena kami mau bayar kontraktor bagaimana kalau ini belum *reimburse*? Seharusnya kan uang bergulir ya, seperti pada ruas lain,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Keuangan PT Waskita Karya Tbk. Haris Gunawan mengatakan bahwa LMAN masih belum

mencairkan Rp6,5 triliun dari proyek pembebasan lahan jalan tol milik perseroan dan anak usahanya tersebut.

Dalam pengembalian dana talangan ini ada persoalan tersendiri karena LMAN melakukan verifikasi yang sudah dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga yang sudah lolos audit BPKP belum tentu lolos audit LMAN.

“Jadi, kalau di BPKP itu sebenarnya yang sudah lolos itu tahun ini Rp3,40 triliun, tetapi LMAN melakukan verifikasi ulang sehingga yang dicairkan ya, yang sesuai yang sudah dia verifikasi tidak langsung Rp3,40 triliun cair,” paparnya.

Padahal, seharusnya perusahaan dengan kode emiten WSKT tahun ini tidak lagi bermasalah dengan aliran kas karena setelah dihitung beberapa *turn key* tahun ini beberapa cair, ditambah dengan Rp6,50 triliun yang seharusnya cair juga. “Jadi, kalau dengan LMAN mungkin Rp30 triliun lebih *cashflow* kami.”

## TOL BALSAM

Pada bagian lain, PT Jasamarga Balikpapan Samarinda, anak usaha PT Jasa Marga Tbk., memperkirakan jalan tol Balikpapan—Samarinda (Balsam) bisa beroperasi secara fungsional pada Mei 2019 atau masa mudik Lebaran. Jalan tol sepanjang 99,35 kilometer itu dijadwalkan

beroperasi penuh pada Juli 2019.

Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan Samarinda S.T.H. Saragi mengatakan bahwa progres pembebasan secara kumulatif hingga awal April 2019 telah mencapai 98,77%.

Sementara itu, progres konstruksi yang menjadi lingkup pekerjaan perusahaan mencapai 84,99%.

PT Jasamarga Balikpapan Samarinda menangani seksi 1 KM 13, seksi 2, seksi 3, dan seksi 4, sedangkan seksi lainnya sepanjang 33,11 kilometer menjadi lingkup pekerjaan pemerintah.

Saragi optimistis bahwa progres konstruksi bisa berjalan sesuai dengan jadwal kendati ada beberapa tantangan.

Dia menyebutkan bahwa pihaknya secara berkala menjalin koordinasi dengan kontraktor untuk meningkatkan kapasitas produksi harian untuk mengejar target mingguan.

“Kami juga berkoordinasi dengan konsultan perencana untuk percepatan desain penanganan *soft soil*,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (8/4).

Menurut Saragi, seksi 2, seksi 3, dan seksi 4A dijadwalkan bisa beroperasi secara fungsional pada Mei 2019 guna mendukung arus mudik dan balik Lebaran 2019.

Adapun, untuk keseluruhan seksi, jalan tol diharapkan beroperasi pada Juli 2019. (*Krizia P. Kinanti/Rivki Maulana*)

Judul	Proyek Ladongi Rampung Tahun ini	Tanggal	Selasa, 9 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Kementerian PUPR memacu pembangunan Bendungan Ladongo yang sudah dikerjakan sejak 2016. Proyek Sumber daya air yang berada di Sulawesi Tenggara ini akan dirampungkan pada tahun ini.		

# Proyek Ladongi Rampung Tahun Ini

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memacu pembangunan Bendungan Ladongi yang sudah dikerjakan sejak 2016.

Proyek sumber daya air yang berada di Sulawesi Tenggara itu akan dirampungkan pada tahun ini.

Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan bendungan tersebut sudah mencapai 60%. "Ya, Bendungan Ladongi menjadi salah satu bendungan yang akan selesai tahun 2019. Progres sekitar 60%," ujarnya ketika dihubungi *Bisnis*, Senin (8/4).

Pembangunan Bendungan Ladongi ini terus berjalan sesuai dengan rencana dengan melibatkan kontraktor pelaksana PT Utama Karya dan PT Bumi Karsa (swasta nasional), serta perusahaan konsultan perencana PT Wecon dan beberapa perusahaan yang terlibat sebagai pengawas.

Bendungan Ladongi nantinya akan mengairi lahan persawahan irigasi seluas 3.604 hektare di Kolaka Timur, termasuk sebagian kabupaten terdekat seperti Konawe.

Manfaat lain setelah proyek Bendungan Ladongi itu selesai, selain layanan areal irigasi juga sebagai penyediaan air baku untuk wilayah Kecamatan Ladongi dan Kecamatan Tirawuta.

Selain itu, manfaat irigasi itu juga sebagai penyediaan energi listrik sebesar 1,50 MW dan bisa mereduksi banjir Kabupaten Kolaka Timur se-

besar 51,86% dan objek wisata bagi masyarakat dan budi daya perikanan air tawar.

Sementara itu, Perum Jasa Tirta II melakukan beragam upaya konsevasi untuk menjaga kelestarian sumber daya air di Daerah Aaliran Sungai (DAS) Citarum. Kelestarian sungai sepanjang 297 kilometer perlu dijaga karena menjadi tumpuan sumber irigasi dan air baku di Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Direktur Utama Perum Jasa Tirta II U. Saefudin Noer mengatakan bahwa perusahaan melakukan berbagai perawatan infrastruktur perairan agar berfungsi optimal. Secara rutin, perseroan merawat dan merehabilitasi saluran di seluruh seksi, mulai dari daerah tangkapan air, mata air, dan sepanjang aliran air.

Hingga kuartal pertama 2019, BUMN itu sedikitnya merehabilitasi saluran di lima seksi, yaitu seksi Binong, Tarum Timur, Subang, Patrol, dan Sukamandi.

Upaya konservasi sumber daya air, lanjutnya, perlu terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan kebersihan dalam jangka panjang.

Dia menyebutkan bahwa sinergi antarpemangku kepentingan agar wilayah sungai tetap lestari.

"Perlu edukasi berkelanjutan juga agar semua pihak memelihara daerah tangkapan air, sumber dan mata air, daerah aliran sungai dan memanfaatkan air dengan bijaksana," ujarnya kepada *Bisnis*, Minggu (8/4). (Krizia P. Kinanti/Rivki Maulana)

Judul	Gubernur DKI Terbitkan Pergub	Tanggal	Selasa, 9 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)		
Resume	Dalam Pergub tersebut, yang dimaksud dengan naturalisasi adalah pengelolaan prasarana SDA melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dengan tetap memperhatikan kapasitas tampung, fungsi pengendalian banjir, serta konservasi.		

# Gubernur DKI Terbitkan Pergub

Bisnis, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air (SDA) Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

► Sesuai dengan konsep naturalisasi yang diusung oleh Pemprov DKI Jakarta, RTH di DKI Jakarta kedepannya akan difungsikan sebagai tempat penampungan air atau *retarding basin*.

Muhammad Wildan  
redaksi@bisnis.com

Dalam pergub tersebut, yang dimaksud dengan naturalisasi adalah pengelolaan prasarana SDA melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dengan tetap memperhatikan kapasitas tampung, fungsi pengendalian banjir, serta konservasi.

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas SDA akan melaksanakan pembangunan RTH dalam batas garis sempadan sungai.

"Pergub itu memberikan otoritas kepada Dinas SDA untuk menganggarkan pohon, lampu, trotoar, itu nanti yang dibangun," kata Plt. Kepala Dinas SDA Yumada Faizal, Senin (8/4).

Pengadaan RTH tersebut pun dapat dibiayai melalui APBD ataupun melalui sumber-sumber lain.

Sesuai dengan konsep naturalisasi yang diusung oleh Pemprov DKI Jakarta, RTH di DKI Jakarta kedepannya akan difungsikan sebagai tempat penampungan air atau *retarding basin*.

Air hujan yang turun akan dibiarkan menggenangi di RTH dan dibiarkan tersedap ke dalam tanah. Bila perlu, air tersebut akan dibendung untuk mengurangi run off dan menambah cadangan air tanah DKI Jakarta.

Di lain pihak, pengamat tata kota Nirwono juga berpandangan, pada hakikatnya dalam konsep naturalisasi garis sempadan sungai memang seharusnya diperuntukkan sebagai RTH.

"Jika dimaksimalkan di 13 sungai sebenarnya akan mendapat penambahan luas RTH yang cukup signifikan," kata Nirwono, Senin (8/4/2019).

Sesuai dengan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa proporsi RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dan hingga saat ini baru mencapai 14,9%.

Dalam konsep besarnya, yang dimaksud dengan naturalisasi adalah pengupayaan penahanan aliran air agar air yang mengalir di sungai sesuai dengan kapasitas sungai.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta pun mengupayakan penambahan waduk, situ, dan embung sebagai dan air hujan serta air kiriman akan dialirkan ke waduk

dan situ yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta.

Selain berfungsi untuk mencegah banjir yang disebabkan oleh aliran air yang melebihi kapasitas sungai, air yang tertahan juga dapat digunakan sebagai air baku yang dapat diolah menjadi air bersih oleh PD PAM Jaya.

"Naturalisasi itu mengupayakan aliran air ditangkap, ditahan, dan mudah-mudahan jadi air baku," kata Yumada.

Pada 2019, Anies menyebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan membangun sodetan menuju Setu Babakan sebelum mengalir ke Kali Palo untuk mengendalikan debit air dari Depok menuju wilayah DKI Jakarta.

Selain itu, Anies juga menyebutkan akan ada lima lokasi penerapan naturalisasi. Namun, Anies enggan menerangkan lima lokasi yang dimaksud.

"Ada lima lokasi tapi nanti kalau sudah

siap semua baru," kata Anies.

Konsep naturalisasi ini pun berbeda dengan konsep normalisasi yang diusung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cihwang Cisadane (BBWSCC) yang mengupayakan pelebaran sungai melalui betonisasi sungai untuk menampung aliran sungai dari daerah hulu.

Kepala BBWSCC Bambang Hidayah mengatakan, pihaknya akan bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyamakan visi mengenai konsep naturalisasi sungai tersebut.

Menurut Kementerian PUPR, program ini terhenti selama 2 tahun, karena terkendala oleh pembebasan lahan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Adapun dalam APBD 2019 Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan dana pengadaan tanah sungai dan saluran sebesar Rp500 miliar untuk pembebasan lahan. ■

**Banjir**  
Masih Terus Mengintai  
Warga Jakarta

Banjir menjadi momok bagi sebagian penduduk Jakarta. Ketika memasuki musim penghujan, warga Ibu Kota, khususnya di bantaran kali, sudah harus bersiap-siap menghadapi datangnya banjir. Meski banjir datang dan pergi dengan cepat, tetapi frekuensinya bisa berulang. Pemerintah pun membuat sejumlah kebijakan untuk menanggulangi banjir. Sayangnya, proyek itu kini tak berjalan sesuai dengan perkiraan.

**Proyek Penanganan Banjir di Jakarta dan Sekitarnya\***

- **Waduk Cilei 1 & Sukamahi**
  - Kebutuhan Lahan: 79 ha dan 13 ha
  - Kapasitas: 1,8 juta meter kubik dan 2,4 juta meter kubik
  - Biaya: Rp1,9 triliun
  - Masa pembangunan: 2 tahun-3 tahun
  - Kendala: Topografi (tanah lembek), tinggi tanggul tidak maksimal, dan pembebasan lahan, koordinasi antara pemerintah wilayah.
- **Sodetan Cihwang-Cisadane**
  - Panjang 2,9 km
  - Biaya: Rp1,5 triliun
- Masa pembangunan: 3 tahun
- Kendala: Koordinasi dengan Pemprov Banten, pembebasan lahan, koordinasi antara pemerintah wilayah.
- **Multipurpose Deep Tunnel**
  - Panjang: 29 km
  - Kapasitas: 250 meter kubik per detik
  - Biaya: Rp30 triliun
  - Masa pembangunan: 50 tahun
  - Kendala: Tidak layak, pembangunan butuh waktu lama, biaya yang terlalu besar, ditolak oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Sumber: Dari berbagai sumber diolah. \*1. Perhitungan awal 2014. BANGIRADJO DO

Judul	<b>Bali Dapat Jatah 14 Proyek</b>	Tanggal	Selasa, 9 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)		
Resume	Bali direncanakan mendapat 14 proyek infrastruktur untuk periode 2020-2024, di antaranya jalan tol Gilimanuk – Denpasar , pembangunan jaringan air minum, dan pengelolaan sampah.		

## Bali Dapat Jatah 14 Proyek

Bisnis, MANGUPURA — Bali direncanakan mendapat 14 proyek infrastruktur untuk periode 2020-2024, di antaranya jalan tol Gilimanuk-Denpasar, pembangunan jaringan air minum, dan pengelolaan sampah.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto mengatakan secara nasional dalam kurun 2020-2024 akan dikerjakan sejumlah proyek infrastruktur.

“Pemerintah menganggarkan Rp2.058 triliun yang 30% di antaranya melalui APBN dan sisanya dikerjasamakan dengan pihak swasta,” katanya di sela-sela kegiatan pembinaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, Senin (8/4).

Menurut Eko, proyek tersebut dimaksudkan agar Indonesia bisa mendapat layanan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan.

Dari hasil identifikasi, jumlah proyek yang akan dikerjakan dibagi berdasarkan bidang, yakni pertama terkait dengan sektor sumber daya air untuk pembangunan waduk, bendungan, saluran irigasi dan yang lainnya sebanyak 7 proyek skala nasional.

“Untuk infrastruktur jalan dan jembatan meliputi jalan tol, jalan nasional dan jembatan akan ada sebanyak 83 proyek,” katanya

Menurutnya, dari 83 proyek tersebut 11 proyek merupakan non trans Jawa, 8 proyek Jabodetabek, 2 proyek Sumatra, 19 proyek Kalimantan, 29 proyek Sulawesi dan 14 proyek di Bali.

Bidang perumahan direncanakan sebanyak 10 proyek untuk membangun rumah susun umum, rumah susun khusus dan rumah susun negara. Bidang permukiman terkait infrastruktur air minum, pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan resapan direncanakan 20 proyek.

Dia menjelaskan, sebanyak 14 proyek di Bali di antaranya jalan tol Gilima-

nuk-Denpasar, pembangunan SPAM, pengelolaan sampah dan air minum.

Dia menambahkan, karena pembiayaan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), bergantung pihak swasta mana yang akan diprioritaskan.

Terkait dengan kegiatan pembinaan yang dilakukan di sejumlah daerah, Eko menjelaskan, di antaranya untuk mendorong berjalannya sinergi proyek KPBU yang telah memasuki tahap konstruksi dengan program infrastruktur daerah.

Selain itu, juga untuk mendorong KPBU subsektor air minum, persampahan, jalan, jembatan, dan perumahan.

Pada perkembangan lain, tren pasar properti di Surabaya pada kuartal I tahun ini belum menunjukkan gairah mengingat sebagian besar pasar masih menunggu momen pemilihan umum berakhir.

Direktur Senior PT Ciputra Development Tbk, Sutoto Yakobus mengatakan, meski pasar masih belum hangat tetapi pada kuartal I/2019 ini sudah banyak pengembang berancang-ancang dengan meluncurkan produk-produk baru dan beragam kiat atau promosi untuk menggaet pasar.

“Dari beberapa proyek kami di sepanjang kuartal I ini, penjualannya ada yang bagus, ada yang biasa saja, dan *over all* memang pasarnya masih belum hangat sekali, karena ada orang yang masih menunggu pemilu, yang harapannya pemilu segera berlalu,” katanya saat *Media Update Project North West Series Citraland*, Senin (8/4).

Dia mengatakan, pada 3 bulan pertama tahun ini di Surabaya sudah banyak pengembang yang mulai menggelar pameran dan meluncurkan produk barunya, baik *landed house* maupun apartemen.

Produk tersebut misalnya Jayaland, Shoji Land, dan Puri City yang baru-baru ini meluncurkan produk rumah lebih dahulu. (*Erna Sukarelawanto/Peni Widarti*)

Judul	<b>Madura Bisa Jadi KEK Garam</b>	Tanggal	Selasa, 9 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak saat membuka Forum Group Discussion KEK Garam di Universitas Trunojoyo Madura mengatakan, Madura memiliki potensi besar dalam produksi garam mengingat selama ini Madura berkontribusi 60% dari total produksi garam nasional		

# Madura Bisa Jadi KEK Garam

Bisnis, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong Pulau Madura menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Garam, karena dinilai berpotensi tinggi dalam memproduksi garam nasional.

Peni Widarti & Yudi Supriyanto  
redaksi@bisnis.com

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak saat membuka Forum Group Discussion KEK Garam di Universitas Trunojoyo Madura mengatakan, Madura memiliki potensi besar dalam produksi garam mengingat selama ini Madura berkontribusi 60% dari total produksi garam nasional.

"Namun untuk menuju KEK Garam diperlukan dukungan dari banyak pihak, termasuk Universitas Trunojoyo Madura harus mampu menjadi pilar pengembangan Pulau Madura ini," katanya dalam rilis, Senin (8/9).

Dia menjelaskan, produksi garam di Madura masih membutuhkan teknologi tinggi yang mampu mengatasi masalah kerentanan terhadap kondisi cuaca, misalnya *flow down technology system* yang sedang diujicobakan. "Kami berharap Madura ini juga bisa menjadi Pusat Unggulan Iptek (PUI) Garam yang memiliki *science technopark* atau taman teknologi yang menjadi rujukan daerah lain, karena yang namanya PUI Garam, ya harus di Pulau Garam," imbuhnya.

Rektor UTM Muh. Syarif mengatakan, pengembangan

► **Produksi garam di Madura masih membutuhkan teknologi tinggi yang mampu mengatasi masalah kerentanan terhadap kondisi cuaca.**

KEK Garam di wilayah Madura merupakan inisiatif strategis dari UTM dalam pengembangan teknologi dan bisnis. Saat ini sudah ada 4 hektare lahan di Kabupaten Pamekasan yang diakuisisi UTM untuk dijadikan sebagai fasilitas laboratorium terpadu.

"Dari luas tersebut termasuk 1 ha lahan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disinergikan dengan kami untuk pengembangan produksi garam," katanya.

## KAWASAN BARU

Pada perkembangan lain, DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia berharap, terdapat sebanyak mungkin kawasan industri di Jateng guna mempercepat pertumbuhan investasi.

Ketua DPD Apindo Jateng Frans Kongi menuturkan, pihaknya sudah lama meminta pemerintah daerah untuk membangun sebanyak mungkin kawasan industri guna menarik pemilik modal melakukan investasi di Jawa Tengah.

"Jadi, kami menyambut gembira untuk mempercepat pertumbuhan investasi di Jateng," kata Frans kepada *Bisnis*, Senin (8/4).

Dia menjelaskan, pihaknya meminta pemerintah daerah untuk membangun sebanyak mungkin kawasan industri karena beberapa faktor, seperti lahan yang tersedia memiliki harga terjangkau, dan mudahnya perizinan yang harus diurus.

Selain itu, tersedianya fasilitas seperti air dan listrik serta infrastruktur lainnya juga menjadi alasan asosiasi meminta kepada pemerintah daerah

Jawa/Madura	Indonesia Timur
<b>Iklim</b> 4-5 bulan kering	<b>Iklim</b> 6-8 bulan kering
<b>Slinitas (derajat baume)</b> 2-3	<b>Slinitas (derajat baume)</b> 4-5
<b>Teknologi</b> Padat karya	<b>Teknologi</b> Mekanisasi
<b>Panen</b> 7-10 hari	<b>Panen</b> 1 musim
<b>Kualitas garam (NaCl)</b> 94%-97%	<b>Kualitas garam (NaCl)</b> >97%

**Karakteristik Lokasi Tambak Garam**

Sumber: Kemendik Maritim BISNIS/TRI UTOMO

untuk membangun sebanyak mungkin kawasan industri di Jawa Tengah. "Akses keluar dan masuk mudah dan bisa dengan kawasan berikat," katanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah menyebutkan, sudah terdapat investor yang menyatakan minatnya untuk menanamkan modalnya di kawasan industri baru yang akan dibangun di Jawa Tengah.

Pt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi (DPMPTSP) Jateng Didik Subiyantoro mengungkapkan, saat ini perkembangan rencana pembangunan empat kawasan industri baru di Jawa Tengah masih menunggu revisi tata ruang wilayah.

"Sudah ada [investor yang menyatakan minatnya untuk investasi di empat kawasan in-

dustri baru yang akan dikembangkan]," kata Didik kepada *Bisnis*, Senin (8/4).

Dia menjelaskan, pembahasan revisi tata ruang wilayah guna membangun empat kawasan industri baru di Jawa Tengah masih di pemerintah pusat.

Terkait dengan investor dan asal negara investor yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di empat kawasan industri baru yang akan dibangun, Didik menyebutkan bahwa hal itu belum bisa disebutkan.

"Masih menunggu revisi tata ruang. Saat ini masih pembahasan di Jakarta," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana, membangun kawasan industri baru di Kabupaten Brebes, Rembang, Kebumen, dan Cilacap.

Pembangunan empat kawasan industri baru tersebut sebagai upaya pemerintah mendorong investasi. ■

Judul	Pemerintah Perbanyak Model Investasi Infrastruktur Swasta	Tanggal	Selasa, 9 April 2019
Media	Koran Tempo (Halaman, 25)		
Resume	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, mengatakan akan menambah skema investasi untuk swasta agar berperan lebih besar dalam pembangunan infrastruktur		

# Pemerintah Perbanyak Model Investasi Infrastruktur Swasta

Swasta diizinkan membeli proyek atau hanya menggarap pemeliharaannya.



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro (tengah), saat berkunjung ke kantor Tempo, Jakarta, kemarin.

Andi Ibnu

andi.ibnu@tempo.co.id

**JAKARTA** – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, mengatakan akan menambah skema investasi untuk swasta agar berperan lebih besar dalam pembangunan infrastruktur. Berbagai skema menarik, kata dia, diberikan melalui kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). “Kalau hanya mengandalkan uang negara dan badan usaha milik negara (BUMN), keteringgalan infrastruktur takkan terkejar,” kata dia di gedung Tempo, kemarin.

Bambang mengatakan swasta akan diizinkan terlibat dalam proyek infrastruktur yang sudah berjalan atau dalam fase *brown field*. Tak hanya itu, dia mengatakan swasta juga diperbolehkan membeli proyek yang sudah jadi atau hanya menjadi operator sebuah infrastruktur.

“Menangani *maintenance*-nya saja juga boleh,” ujar dia.

Berbagai tawaran tersebut, kata Bambang, diberikan agar pendanaan dari BUMN melonggar. Dia tak menampik banyak proyek infrastruktur yang bernilai komersial dikuasai oleh perusahaan negara. “Tapi tidak bisa disalahkan juga, karena saat pembangunan infrastruktur digenjol sejak 2015, swasta baru mempelajari saja. Belum terlibat.”

Dalam lima tahun terakhir, pemerintah menggelontorkan anggaran infrastruktur Rp 1.820 triliun. Selain membangun infrastruktur fisik, seperti jalan, pelabuhan, dan bandar udara, dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur kesehatan, sanitasi, dan irigasi. Namun pemerintah masih kekurangan dana lebih dari Rp 3.000 triliun dari total kebutuhan infrastruktur lima tahunan sebanyak Rp 5.000 triliun.

Dengan partisipasi swasta yang ditargetkan bernilai Rp 2.000 triliun, pemerin-

tah hanya menggantungkan sisa kebutuhan dana pada BUMN. Namun, karena ada beberapa kendala, rasio realisasi skema KPBU hanya ada di kisaran 10-15 persen. “Pemerintah juga terus meyakinkan lembaga audit negara. Kalau ada swasta yang mendapat keuntungan bisnis besar, tidak perlu dipermasalahkan,” kata Bambang.

Sebelumnya, pengusaha mengeluh soal dominansi BUMN dalam proyek infrastruktur pemerintah. Jumlah partisipasi BUMN yang hanya puluhan membengkak jadi ribuan setelah perusahaan anak dan terafiliasinya ikut terlibat. “Bagaimana mau dapat proyek, BUMN ada di proyek yang bagus-bagus pula,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Roeslani, beberapa waktu lalu. Dia pun menyambut baik langkah pemerintah yang melarang BUMN terlibat dalam proyek yang bernilai kurang dari Rp 50 miliar dan melakukan lelang tender terbuka di proyek besar.

Selain mengenai penguasaan BUMN, swasta mengeluhkan rumitnya birokrasi pemerintah. Direktur Bisnis dan Pengembangan PT Mina Transindo Totabuan, Radinal Efendy, mengatakan, hingga akhir Maret lalu, partisipasi perusahaannya dalam proyek hunian terintegrasi fasilitas transportasi atau *transit oriented development* Poris Plawad, Tangerang, selama hampir dua tahun bak jalan di tempat. “Kemajuannya baru mencapai tahap *final business case* di level persiapan. Masih panjang untuk *financial close*,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan lembaganya juga memiliki berbagai fasilitas fiskal, seperti bantuan langsung APBN, untuk menutupi kekurangan pendanaan hingga jaminan negara atas keberlangsungan pembangunan suatu proyek. “Kalau masih ada keluhan dari kementerian teknis, perlu dipertanyakan kesiapan dan komitmennya,” kata Menteri Sri.

● CAESAR AKBAR

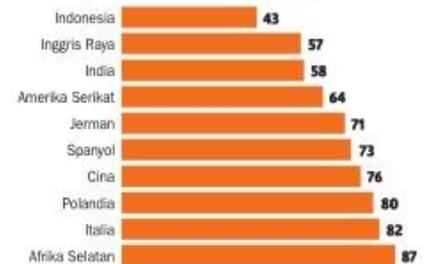


Jembatan tol Kunciran-Bandara Soekarno-Hatta di kawasan Rawa Bokor, Tangerang, Banten, 21 Maret lalu.

## Medioker

Rasio ketersediaan infrastruktur dengan produk domestik bruto Indonesia masih belum kompetitif dibandingkan dengan negara lain.

### Perbandingan Rasio Infrastruktur Global (Persen)



### Peringkat Kualitas Infrastruktur

	2014	2015	2016	2017
Kualitas jalan raya	72	81	80	68
Kualitas tol	41	43	39	30
Kualitas pelabuhan	77	82	75	72
Kualitas bandara	64	66	62	51
Kualitas suplai listrik	84	86	89	86
Rata-rata	72	81	80	68

### Porsi Pembiayaan Infrastruktur (Rp Triliun)



### Aneka Insentif untuk Swasta

- *Project development fund*: Fasilitas fiskal pendanaan untuk bantuan teknis.
- *Viability gap funding*: Dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi secara tunai pada proyek.
- *Infrastructure guarantee*: Jaminan keberlangsungan pembangunan proyek serta pendampingan konsultan pembangunan, hukum, dan pendanaan.
- *Availability payment scheme*: Pemerintah menjamin pengembalian investasi dalam jangka waktu tertentu.

● ANDI IBNU

SUMBER: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | BANK DUNIA | MCKINSEY

